



Rekanan Proyek Drainase Soepomo Diputus Kontrak

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta bakal memutus kontrak rekanan yang mengerjakan proyek saluran drainase Jalan Soepomo. Hal itu berdasarkan pada surat rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terkait proyek saluran drainase Soepomo yang mangkrak karena rekanan tersangkut kasus hukum dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Rekomendasi LKPPK sudah turun. Sesuai rekomendasi LKPP kami putus kontrak," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, Selasa (30/9).

Untuk penataan lokasi proyek yang sudah mangkrak sebulan pihaknya menunggu surat resmi dari KPK. Jika

rekomendasi dari KPK sudah ada, Dinas PUPKP akan menata dengan normalisasi jalan yang telah digali. Diperkirakan penutupan lubang-lubang galian itu membutuhkan waktu sekitar dua minggu.

"Setelah ada rekomendasi dari KPK kami baru tata kembali dengan menutup lubang-lubang galian. Kami amankan dan kembalikan dulu sehingga jalan bisa berfungsi," paparnya.

Secara terpisah Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, juga menyampaikan surat rekomendasi terkait proyek saluran drainase Jalan Soepomo, dari LKPP sudah terbit. Menurutnya jika proyek itu dilanjutkan pekerjaannya oleh rekanan baru, waktu yang tersisa pada tahun anggaran 2019 sangat terbatas.

**Bersambung ke halaman 9*

"Kalau dilanjutkan rekanan baru harus mekanismenya dilelang paling tidak dua bulan. Jadi kemungkinan besar penutupan kembali karena kalau dilanjutkan waktu-

nya nggak cukup," tandas Heroe.

Seperti diketahui sudah sebulan proyek saluran drainase Jalan Soepomo yang mulai dikerjakan di Jalan Babaran sisi barat terhenti.

Dampaknya akses jalan itu hanya bisa dilalui kendaraan bermotor roda dua dan beberapa lubang galian.

Rekanan yang mengerjakan

proyek dan oknum jaksa pengawal Tim Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) terkena operasi tangkap tangan KPK. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005